

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

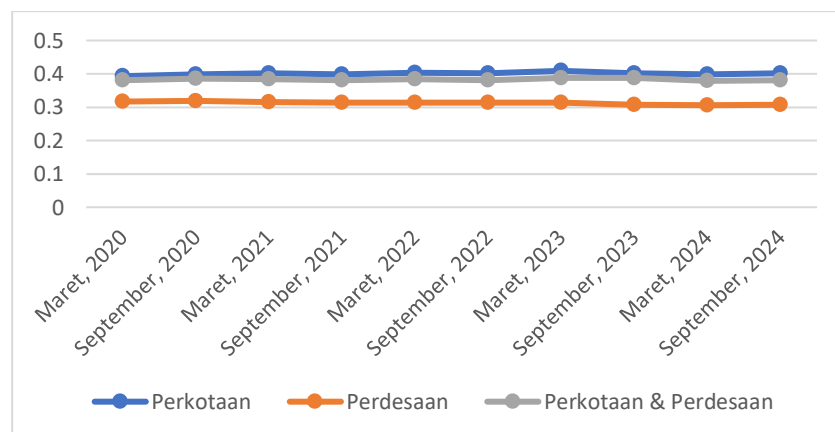
Pembangunan ekonomi menjadi fokus utama dalam menilai kemajuan suatu daerah karena dianggap berkaitan dengan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup secara menyeluruh. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan dijalankan pemerintah daerah adalah kemajuan di sektor ekonomi, mencakup seluruh elemen dalam wilayah tersebut. Pembangunan ekonomi melibatkan peran aktif pemerintah, sektor swasta, serta masyarakat luas dalam prosesnya (Hartati, 2022). Langkah ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara maksimal demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan langkah meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan target utama setiap negara, hal ini menjadi bagian dari peran pemerintah sebagai agent of development dalam menjaga stabilitas ekonomi. Karena setiap kebijakan dirancang dan diterapkan harus mempertimbangkan aspek kesejahteraan masyarakat, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Selain itu, upaya meningkatkan kesejahteraan perlu didukung oleh pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berkualitas (Rahayu, 2024).

Peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak terlepas dari aspek distribusi pendapatan adil dan merata. Ketimpangan pendapatan tinggi dapat menghambat pencapaian kesejahteraan karena sebagian besar sumber daya ekonomi hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu, sehingga mengurangi akses kelompok masyarakat berpenghasilan rendah terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi (Todaro & Smith, 2020)

Pemerintah menghadapi tantangan dalam mengurangi ketimpangan pendapatan, mengingat tren ketimpangan khususnya di Indonesia. Kondisi ini dikhawatirkan dapat berdampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat. Pada Februari 2025 mengindikasikan bahwa kelas menengah Indonesia menyusut dari 60 juta orang pada 2018 menjadi 47,9 juta orang pada 2024, atau turun dari 21,5% menjadi 17% dari total populasi Menurut (Financial Times, 2025). Penyusutan ini terjadi karena kenaikan harga kebutuhan dasar seperti perumahan, pendidikan, dan kesehatan lebih cepat dibandingkan pertumbuhan pendapatan. Akibatnya, banyak keluarga kelas menengah rentan turun kembali ke kelas bawah.

Gambar 1.1 Perkembangan Gini Indonesia 2020-2024



Sumber : BPS Indonesia, 2024

Gini Ratio sebagai indikator utama ketimpangan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan cukup mencolok perkotaan dan perdesaan. Perkotaan konsisten berada diatas (0.39-0.41), sedangkan perdesaan lebih rendah berkisar (0.30-0.32). Ketimpangan tinggi terjadi di perkotaan mengindikasikan bahwa pendapatan lebih terkonsentrasi pada kelompok tertentu, kemungkinan akibat akses tidak merata terhadap pendidikan, pekerjaan formal, dan layanan publik lainnya.

Pada perdesaan meskipun memiliki keterbatasan infrastruktur dan peluang ekonomi, justru menunjukkan distribusi pendapatan lebih merata. Sedangkan, mencakup kedua wilayah cenderung stabil pada kisaran (0.38 -0.39), mencerminkan pengaruh dominan perkotaan terhadap agregat nasional. Tren menunjukkan upaya pemerataan ekonomi masih menghadapi tantangan, terutama dalam mengurangi kesenjangan perkotaan tinggi dibandingkan perdesaan, mengindikasikan bahwa kesenjangan antara berpenghasilan tinggi dan rendah.

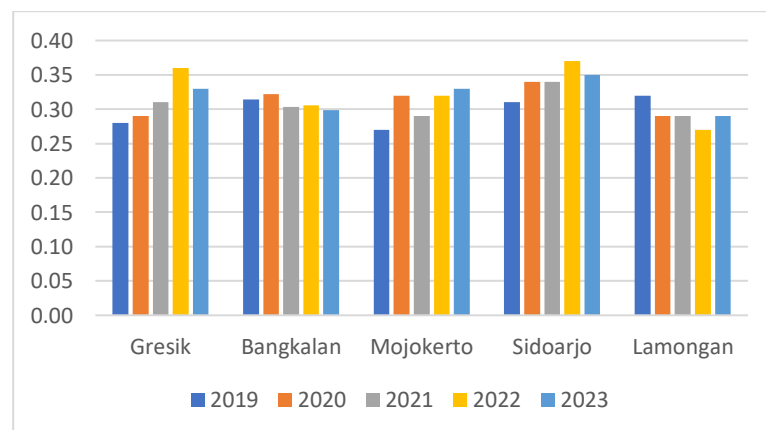
Pembangunan ekonomi di Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dihadapkan permasalahan ketimpangan distribusi pendapatan. Jawa Timur sebagai salah satu provinsi dengan kontribusi (PDRB) terbesar di Indonesia menghadapi persoalan ketimpangan distribusi pendapatan. Dengan jumlah penduduk besar dan aktivitas ekonomi beragam, memperlihatkan adanya disparitas kesejahteraan antarwilayah.

Kota Surabaya sebagai pusat perekonomian Jawa Timur berperan penting dalam mendorong aktivitas ekonomi wilayah sekitarnya. Kehadiran Surabaya melahirkan kawasan penyangga 5 Kabupaten (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Lamongan, dan Sidoarjo) dipilih karena letaknya strategis dan perannya sebagai wilayah penyangga (buffer zone). Memiliki keterkaitan ekonomi kuat dengan kota inti, baik melalui arus tenaga kerja, investasi, maupun perdagangan. Secara teoritis, kedekatan dengan kota metropolitan seharusnya mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi namun, perkembangan antar kabupaten tidak seragam.

Ketimpangan distribusi pendapatan adalah perbedaan dalam tingkat pendapatan diterima oleh setiap individu dalam suatu masyarakat, sehingga menimbulkan kesenjangan kelompok ekonomi atas dan bawah. Ketimpangan dalam distribusi pendapatan dapat memicu permasalahan sosial dan berkontribusi terhadap ketidakstabilan ekonomi akibat tingginya jurang pemisah dalam kesejahteraan masyarakat (Maesza et al., 2022). Fenomena ini terjadi ketika pertumbuhan ekonomi tidak diikuti dengan pemerataan kesejahteraan sehingga sebagian masyarakat menikmati peningkatan pendapatan secara signifikan, sementara sebagian lainnya masih tertinggal.

Selain itu, jumlah pendapatan diterima masyarakat berbeda cukup besar golongan kaya dan golongan miskin. Penyebab terjadinya pada berbagai daerah adalah adanya perbedaan komposisi penduduk, SDA, konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah, alokasi dana pembangunan antar daerah serta perbedaan kondisi demografis (Nurfifah, 2022). Hal ini menyebabkan munculnya istilah daerah maju dan daerah berkembang.

Gambar 1.2 Rasio Gini 5 Kabupaten Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2023



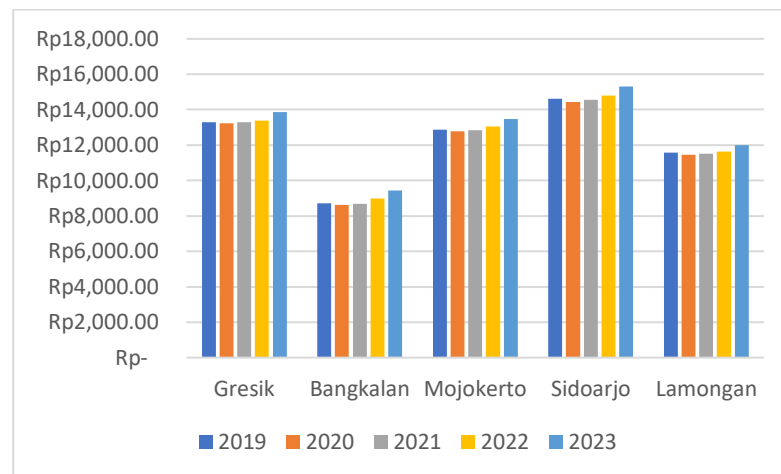
Sumber : BPS Jatim, 2023

Grafik menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan bervariasi antar daerah, dengan Sidoarjo memiliki angka tertinggi (0.38) pada 2022, sedangkan Lamongan relatif lebih rendah di bawah (0.30). Hal ini mencerminkan adanya perbedaan kemampuan ekonomi antar daerah serta pengaruh kondisi eksternal seperti pandemi COVID-19 memperburuk ketidakmerataan. Oleh karena itu, analisis terhadap faktor-faktor memengaruhi ketimpangan penting dalam upaya merumuskan kebijakan pembangunan lebih inklusif di Jawa Timur.

Adapun faktor mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan salah satunya adalah pengeluaran perkapita. Patriotika dalam penelitian (Duarsa & Wijaya, 2023) menyatakan bahwa pengeluaran perkapita berfungsi sebagai indikator dalam menilai standar hidup masyarakat serta tingkat daya beli. Indikator ini memiliki keterkaitan dengan pencapaian kesejahteraan suatu negara, karena mencerminkan kemampuan ekonomi individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pengeluaran perkapita yaitu biaya dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Pengeluaran per kapita memberikan gambaran tingkat daya beli PPP (*Purchasing Power Parity*) masyarakat, sebagai salah satu komponen digunakan dalam melihat status pembangunan manusia. Semakin rendahnya daya beli masyarakat menggambarkan adanya ketimpangan pada suatu daerah (Tumbal, 2023).

Gambar 1.3 Pengeluaran Perkapita 5 Kabupaten Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2023



Sumber :BPS Jatim, 2023

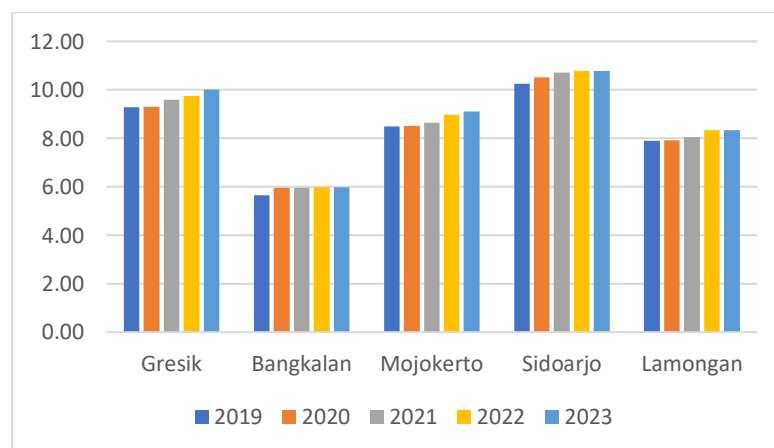
Pendapatan per kapita salah satu indikator mengukur tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat di suatu daerah. Tren diatas menunjukkan adanya perbedaan Sidoarjo dan Mojokerto memiliki pengeluaran perkapita tinggi dibanding daerah lain (Rp15.000) pertahun pada 2023. Sebaliknya, Bangkalan menunjukkan nilai terendah sekitar (Rp9.000), menandakan keterbatasan daya beli masyarakat. Gresik dan Lamongan berada menengah kisaran (Rp11.000–12.000), sementara Mojokerto dan Sidoarjo mengalami tren peningkatan stabil. Perbedaan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum merata, wilayah ekonomi kuat memiliki tingkat kesejahteraan tinggi dibanding daerah bergantung pada sektor tradisional. Tingginya pengeluaran perkapita menunjukkan daya beli lebih kuat, sementara rendahnya pengeluaran mengindikasikan tingkat kesejahteraan masyarakat masih relatif tertinggal.

Pengeluaran perkapita menjadi indikator bahwa distribusi pendapatan belum merata. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan ekonomi lebih merata dan berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan. Dapat dipengaruhi pendapatan perkapita dihasilkan masyarakat. Berdasarkan teori dikemukakan oleh

Keynes bahwa apabila seseorang mendapatkan tambahan pendapatan, maka dia akan meningkatkan konsumsinya namun besaran konsumsi tersebut tidak akan sebesar tambahan pendapatannya (Mankiw, 2018).

Pendidikan merupakan salah satu faktor memengaruhi kualitas SDM dan pembangunan suatu daerah. Dalam mengukur capaian pendidikan menggunakan rata-rata lama sekolah yaitu, jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun keatas telah diselesaikan dalam pendidikan formal. Studi oleh (Todaro & Smith, 2020) ketimpangan tinggi menghambat kesejahteraan masyarakat aspek pendidikan dan kesehatan. Indeks Pembangunan Manusia mencerminkan kualitas SDM suatu wilayah. Tinggi atau rendah indeks berpengaruh terhadap produktivitas penduduk, semakin rendah maka tingkat produktivitas juga cenderung menurun berakibat penurunan pendapatan (Putri, 2024).

Gambar 1.4 Rata Rata Lama Sekolah 5 Kabupaten Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2023



Sumber :BPS Jatim, 2023

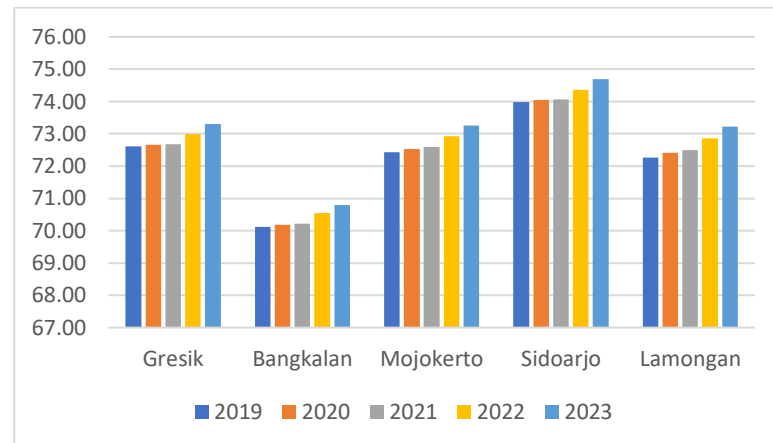
Data rata-rata lama sekolah menunjukkan adanya ketimpangan, Sidoarjo memiliki rata-rata lama sekolah hampir (11 tahun) pada 2023, mayoritas penduduk telah menyelesaikan pendidikan hingga SMA. Sebaliknya, Bangkalan sekitar (6 tahun), menunjukkan sebagian besar penduduknya hanya menamatkan pendidikan

dasar. Hal ini berpotensi memperlebar kesenjangan antar daerah, karena pendidikan lebih rendah membatasi akses terhadap lapangan pekerjaan produktif. Mencerminkan adanya tantangan serius dalam peningkatan akses dan kualitas pendidikan, berdampak terhadap rendahnya produktivitas tenaga kerja serta terbatasnya peluang ekonomi.

Perbedaan ini mencerminkan adanya kesenjangan akses pendidikan, tingkat pendidikan lebih tinggi umumnya berkorelasi dengan peningkatan keterampilan dan peluang kerja lebih baik, berpengaruh terhadap distribusi pendapatan. Wilayah dengan RLS lebih rendah cenderung memiliki akses ekonomi terbatas, sehingga memperbesar ketimpangan pendapatan. Peningkatan lama sekolah menjadi faktor penting dalam memperbaiki distribusi pendapatan.

Indikator ini penting untuk mengukur kualitas pembangunan manusia suatu daerah, mencerminkan tingkat kesehatan masyarakat dan efektivitas pelayanan. Kesehatan salah satu aspek penting meningkatkan indeks pembangunan manusia menggambarkan proses kehidupan sehat dan panjang, memperoleh pendidikan, serta menikmati standar hidup layak. Oleh karena itu IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah atau negara (F. Ismail et al., 2021). Modal manusia dapat mengacu pada pendidikan, namun juga digunakan untuk menjelaskan jenis investasi manusia mendorong ke arah populasi kesehatan.

Gambar 1.5 Angka Harapan Hidup 5 Kabupaten Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2023

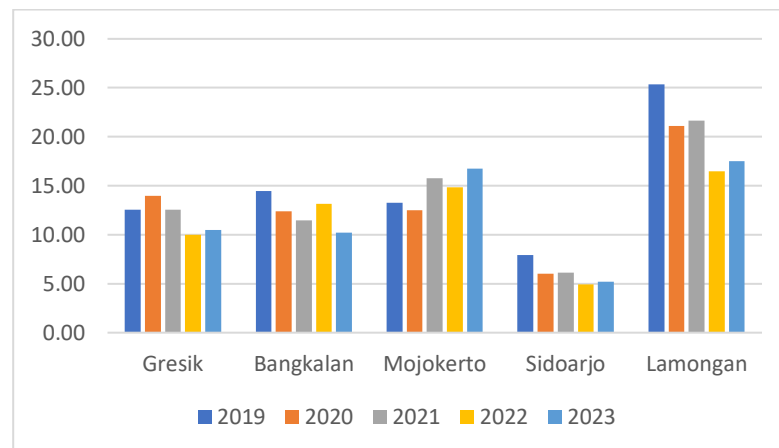


Sumber : BPS Jatim, 2023

Sidoarjo memiliki AHH tertinggi (75 tahun) 2023, sedangkan Bangkalan tertinggal dengan AHH (70 tahun), mencerminkan adanya ketidakmerataan dalam akses pelayanan kesehatan, gizi, dan kualitas hidup masyarakat. Kondisi tersebut berpotensi memperkuat ketimpangan pendapatan, karena daerah dengan tingkat kesehatan lebih rendah cenderung memiliki produktivitas ekonomi lebih rendah. Dengan demikian, peningkatan harapan hidup melalui perbaikan layanan kesehatan, akses gizi, dan kondisi lingkungan menjadi faktor upaya mengurangi ketimpangan. Kebijakan pembangunan lebih inklusif dan merata dalam sektor kesehatan perlu ditingkatkan.

Faktor berikutnya fenomena sosial, pernikahan dini sering menimbulkan permasalahan ekonomi disebabkan terbatasnya pendidikan dan keterampilan kerja. Pasangan menikah muda umumnya belum siap secara finansial untuk mencukupi kebutuhan keluarga, sehingga menimbulkan beban ekonomi. Selain itu, pernikahan dini kerap terjadi di lingkungan keluarga dengan kondisi ekonomi lemah, pernikahan dianggap solusi meringankan beban keuangan (Fitriani, 2019).

Gambar 1.6 Pernikahan Dini 5 Kabupaten Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Jatim, 2023

Lamongan mencapai (>25%) 2019 meskipun menurun berikutnya sebaliknya, Sidoarjo terendah, hanya sekitar (5–7%) menunjukkan kesempatan menikmati *me time* lebih besar, karena individu memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan mengembangkan diri. Hal ini memungkinkan untuk berpartisipasi aktif dan produktif dalam dunia kerja, sehingga mampu meningkatkan pendapatan pribadi dan mendukung pertumbuhan ekonomi lebih merata.

Penelitian ini berkontribusi baru dalam kajian pernikahan dini dengan menekankan pentingnya *me time* bukan berarti waktu untuk bersantai, mencakup waktu individu untuk mengejar pendidikan, karier, pengembangan diri, eksplorasi identitas pribadi sebelum mengambil peran dalam rumah tangga. Semakin banyak individu memilih untuk menunda pernikahan demi menyelesaikan pendidikan tinggi, mengembangkan keterampilan, dan mengejar stabilitas ekonomi (Ayu Rofi Widayanti et al., 2024).

Selain itu, kultural terutama pada Kabupaten Bangkalan dan Lamongan memiliki mencatat angka peningkatan pernikahan dini sehingga, norma sosial sering menempatkan tuntutan peran gender pada pasangan muda. Hal ini didorong oleh pandangan bahwa perempuan sebaiknya segera menikah dan mengurus rumah tangga, sementara pendidikan formal dianggap kurang penting bagi mereka. Dengan demikian, penelitian ini memperluas pemahaman tentang dini melalui perspektif *me time*, sebelumnya belum banyak dieksplorasi dalam literatur penelitian serupa.

Penundaan usia pernikahan berkorelasi positif dengan kualitas hidup dan peluang ekonomi. Delayed marriage memberi ruang bagi individu untuk berinvestasi dalam *human capital*, pada akhirnya meningkatkan peluang pendapatan dan memperkecil risiko masuk dalam kelompok miskin. Sebaliknya, pernikahan dini membatasi ruang pengembangan diri, mengurangi peluang partisipasi produktif dalam pasar tenaga kerja, dan memperbesar kemungkinan seseorang terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketimpangan distribusi pendapatan secara lebih spesifik guna memberikan rekomendasi kebijakan lebih tepat sasaran.

Menurut penelitian oleh (Mudana, 2021) menemukan bahwa, lebih banyak membahas pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan tingkat kesmiskinan tanpa mempertimbangkan peran pendidikan dan kesehatan. Selain itu, penelitian dengan berfokus Provinsi. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis dampak pengeluaran perkapita, RLS, AHH terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.

Berdasarkan uraian tersebut, tidak hanya menganalisis ketimpangan distribusi pendapatan dari sisi ekonomi, tetapi mempertimbangkan faktor sosial dan demografis. Penelitian ini memiliki kebaruan dengan pernikahan dini variabel sosial-kultural jarang dikaji dalam konteks ketimpangan pendapatan. Periode 2013–2023 karena mencerminkan perkembangan dalam kurun waktu satu dekade terakhir, termasuk dinamika sebelum, saat, dan setelah pandemi Covid-19 turut memengaruhi struktur perekonomian dan distribusi pendapatan masyarakat. Dengan periode cukup panjang, penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan tren ketimpangan secara lebih komprehensif.

Dengan meneliti **“Analisis Determinan Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di 5 Kabupaten Provinsi Jawa Timur”**. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai faktor-faktor mempengaruhi disparitas. Hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah maupun perencanaan pembangunan dalam merumuskan kebijakan lebih inklusif, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara seimbang dengan pertumbuhan pesat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan telah diuraikan sebelumnya, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Pengeluaran Perkapita terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di 5 Kabupaten Provinsi Jawa Timur?
2. Bagaimana pengaruh Rata Rata Lama Sekolah terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di 5 Kabupaten Provinsi Jawa Timur?
3. Bagaimana pengaruh Angka Harapan Hidup terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di 5 Kabupaten Provinsi Jawa Timur?
4. Bagaimana pengaruh Pernikahan Dini terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di 5 Kabupaten Provinsi Jawa Timur Tahun?

1.3 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan mampu menurunkan ketimpangan dan mendorong pembangunan lebih merata di seluruh Jawa Timur.

1. Untuk menganalisis pengaruh Pengeluaran Perkapita terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di 5 Kabupaten Provinsi Jawa Timur.
2. Untuk menganalisis pengaruh Rata Rata Lama Sekolah terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di 5 Kabupaten Provinsi Jawa Timur.
3. Untuk menganalisis pengaruh Angka Harapan Hidup terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di 5 Kabupaten Provinsi Jawa Timur.
4. Untuk menganalisis pengaruh Pernikahan Dini terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di 5 Kabupaten Provinsi Jawa Timur.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan data panel berfokus di 5 Kabupaten Provinsi Jawa Timur. Penelitian bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan. Dalam penelitian ini, variabel independen (bebas) meliputi pengeluaran perkapita, rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup, dan pernikahan dini. Sementara itu, variabel dependen (terikat) menggunakan tingkat ketimpangan pendapatan diukur melalui persentase Indeks Gini.

1.5 Manfaat Penelitian

Berlandaskan penjabaran tersebut, penelitian ini memberikan beberapa manfaat dapat diperoleh:

1. Untuk pengkaji, penelitian ini dilakukan bentuk implementasi dari ilmu telah diperoleh selama perkuliahan, sehingga diharapkan dapat menambah wawasan serta pemahaman terkait topik dikaji.
2. Untuk institusi akademik, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan serta sumber informasi bermanfaat dalam mendukung pengembangan mahasiswa ingin melakukan penelitian dengan topik atau permasalahan serupa.
3. Untuk masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta memberikan gagasan bermanfaat dalam mengelola dan sebagai sarana untuk meningkatkan kepedulian sosial dan kesejahteraan di daerah masing-masing.
4. Untuk pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bermanfaat serta acuan dalam memahami faktor-faktor memengaruhi

ketimpangan distribusi pendapatan. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan referensi bagi studi di bidang ekonomi atau kajian lainnya.